

DETERMINASI BELANJA APBDESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

by asnawi asnawi

Submission date: 26-Aug-2024 06:45PM (UTC+0900)

Submission ID: 2415649510

File name: Jurnal_Gebriuna_Indra_Kheriah_1_.docx (197.97K)

Word count: 3444

Character count: 21819

DETERMINASI BELANJA APBDESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

Gebriuna Apriyani¹, Indra Wijaya², Kheriah³

^{1, 2, 3} Politeknik Negeri Lhokseumawe

gebyapriyani@gmail.com

Jalan Medan-Banda Aceh Km. 280, Buketrata, Kota Lhokseumawe

ABSTRACT

Indonesia, as a developing country, is still plagued by poverty problems. The government has made various breakthroughs in alleviating poverty, one of which is through the distribution of village funds. Village funds (APBDesa) are used for: administering village government, implementing village development, community development, empowering village communities, and disaster management. This is in line with the goals of village development, improving community welfare and alleviating poverty. Poverty is indicated through beneficiary families (KPM) who receive the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT). The Chow test and Hausman test recommend the Fixed Effect Model, while the Lagrange Multiplier Test recommends the Common Effect Model. The determination of these three shows that only relatively small expenditures through the Village APBD can explain the decline in poverty levels in Lhokseumawe City. Therefore, the Lhokseumawe City Government must further improve the process of assisting villages, especially in planning expenditures that are oriented towards poverty alleviation because there are still village expenditures that are not in direct contact with poverty alleviation programs.

Keywords: APBDesa, Expenditure, KPM, PKH, BPNT

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang juga masih dihindangi oleh permasalahan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui penyaluran dana desa. Dana desa (APBDesa) digunakan untuk: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Kemiskinan diindikasikan melalui Keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Program Keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Uji Chow dan Uji *Hausman test* merekomendasikan *Fixed Effect Model*, sedangkan Uji *Lagrange Multiplier* merekomendasikan *Common Effect Model*. Determinasi dari ketiganya menunjukkan bahwa belanja melalui APBDesa hanya relatif kecil dapat menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih meningkatkan proses pendampingan kepada desa khususnya dalam perencanaan belanja yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan karena masih terdapat belanja desa yang tidak bersentuhan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: APBDesa, Belanja, KPM, PKH, BPNT

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan isu sentral setiap negara, khususnya bagi negara berkembang. Karena itu, pengetasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan utama pembangunan dari suatu negara. Berbagai pemikiran dan praktik tentang pengentasan kemiskinan telah diadaptasi pada berbagai negara berkembang namun belum memberikan hasil yang optimal. Indonesia sebagai negara berkembang juga masih dihindangi oleh permasalahan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai terobosan dalam pengentasan kemiskinan, salah satu melalui penyaluran dana desa.

Dana desa merupakan bagian dari transfer pusat ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan 5 (lima) tujuan, yaitu: mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, kemasyarakatan dan bencana. Bahkan prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan desa berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan situasi di mana pendapatan rumah tangga terlalu rendah (kesulitan) untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menetapkan keluarga miskin (KM) sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menerima bantuan sosial bersyarat, baik berupa uang, barang, dan jasa yang rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial ini tidak diberikan secara berkelanjutan oleh karena itu bantuan ini tidak mengikat dan tidak wajib, tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu. Salah satu kriteria KPM adalah kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki pekerjaan namun penghasilannya dibawah Rp. 600.000/bulan. KPM menerima bantuan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif pada segala aspek kehidupan Masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDDes. Dalam kaitannya dengan pengelolaan APBDDes, sejumlah pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa telah dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui APBDDes diharapkan pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif karena jumlah orang miskin terbesar berada di wilayah pedesaan. Berdasarkan uraian diatas, kajian ini berusaha untuk mendeterminasi belanja APBDDes terhadap kemiskinan yang direfleksikan dari KPM pada jenis BPNT dan PKH di seluruh desa di Kota Lhokseumawe.

KAJIAN TEORITIS

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa merupakan suatu komunitas, untuk tempat tinggal dan berorientasi sektor pertanian.

Desa diberikan wewenang untuk mengelola APBDesa. APBDesa adalah suatu dokumen berisi perencanaan program atau kegiatan tahunan yang berisi rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa), transfer, serta sumber pendapatan lainnya. PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, hasil swadaya, dan pendapatan lainnya yang dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan juga pendapatan yang berasal dari APBD berupa Alokasi Dana Desa (ADD), ditambah lagi pendapatan lain berupa pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi dan juga bantuan keuangan khusus apabila ada. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa pada 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pendanaan untuk terselenggaranya fungsi pemerintahan desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan melibatkan semua potensi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled development). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan merupakan bidang untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa yang menduduki proses pembangunan desa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Terdapat beberapa indikator-indikator kemiskinan yaitu: ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya (kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi, dan air bersih), tidak memiliki jaminan untuk kehidupan di masa depan, rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan bahwa program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). PKH menjadi program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH pada intinya membantu keluarga miskin agar memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Handayani (2019) mengungkapkan bahwa arah pengaruh DD terhadap kemiskinan adalah positif. Syahputra dan Irfan (2020), mengungkapkan bahwa secara parsial DD berpengaruh sedangkan ADD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, namun, DD dan ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (simultan) di Kota Lhokseumawe. Fadhli dan Nazila (2023) menunjukkan hasil kajian bahwa terdapat pengaruh negatif BPNT dan PKH dalam penanggulangan kemiskinan Dengan diberikannya kedua bantuan secara bersama dapat memberi pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas determinasi 5 (lima) jenis belanja APBDesa terhadap jumlah KPM berupa PKH dan BPNT di Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan adalah data APBDes, data penerima bantuan PKH dan BPNT dari tahun 2021-2023. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk meneliti hubungan antar variable.

Penelitian menggunakan analisis model regresi data panel, dimana 5 (Lima) variabel independen: penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan bencana serta jumlah KPM (PKH dan BPNT) menjadi variabel dependen, sehingga model persamaan menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Persamaan tersebut di ubah sebagai model estimasi data panel adalah:

$$\ln TK_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PP_{it} + \beta_2 \ln PD_{it} + \beta_3 \ln PK_{it} + \beta_4 \ln PM_{it} + \beta_5 \ln PB_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TK_{it} : Tingkat kemiskinan (penerima bansos PKH dan BPNT)

\ln : Logaritma Natural

PP_{it} : Penyelenggaraan Pemerintahan

PD_{it} : Pembangunan Desa

PK_{it} : Pemberdayaan Masyarakat

PM_{it} : Pembinaan Masyarakat

PB_{it} : Penanggulangan Bencana

$\beta_1 - \beta_5$: koefisien variabel independen

α : konstanta

i : *Cross section* (kecamatan)

t : *Time Series* (tahun)

e : error term

Model estimasi data panel pada model estimasi menggunakan 3 (tiga) model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect*. Persamaan *Common Effect Model* adalah:

$$\ln TK_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PP_{it} + \beta_2 \ln PD_{it} + \beta_3 \ln PK_{it} + \beta_4 \ln PM_{it} + \beta_5 \ln PB_{it} + e_{it}$$

Persamaan *Fixed Effect Model* adalah:

$$\ln TK_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PP_{it} + \beta_2 \ln PD_{it} + \beta_3 \ln PK_{it} + \beta_4 \ln PM_{it} + \beta_5 \ln PB_{it} + e_{it}$$

Persamaan *Random Effect Model* adalah:

$$\ln TK_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PP_{it} + \beta_2 \ln PD_{it} + \beta_3 \ln PK_{it} + \beta_4 \ln PM_{it} + \beta_5 \ln PB_{it} + e_{it}$$

Evaluasi data panel pada kajian ini menggunakan beberapa pengujian, yaitu: Uji Chow (tes untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*), dengan ketentuan H_0 : *common effect* (p-value > 0.05) dan H_1 : *fixed effect* (p-value < 0.05). Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dan memilih model yang terbaik antara keduanya, H_0 : *Random Effect* dan H_1 : *Effect Model*. Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk memilih antara kedua model yaitu model *common effect* dan *random effect*, dimana H_0 : *Common Effect* dan H_1 : *Random Effect Model*. Dasar penolakan dengan menggunakan pertimbangan *Cross Section Breusch-Pagan*, jika > 0.05 (*common effect*) dan jika < 0.05 (*random effect*). Uji normalitas dilakukan untuk menguji kondisi distribusi normal dengan membandingkan nilai Probabilitas Jarque-Bera (JB) dengan ketentuan: nilai probabilitas > 0,05 (data terdistribusi normal) dan nilai probabilitas < 0,05 (data tidak terdistribusi normal). Uji multikolinearitas untuk mengamati hubungan antar variabel

independen, melalui Variance Inflation Factor (VIF), dengan ketentuan, jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai (VIF) < 10 (tidak ada multikolinieritas) dan jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai (VIF) > 10 (terdapat multikolinieritas). Uji heteroskedastisitas menguji ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan Uji Breusch Pagan Godfrey (melihat nilai Obs*R-squared), jika nilai signifikansi > 0,05 (tidak terjadi heterokedastisitas) dan nilai signifikansi < 0,05 (terjadi heterokedastisitas).

Operasionalisasi variabel merupakan batasan yang menjelaskan ciri-ciri spesifik atas variable sekaligus menjadi alat ukur. Variabel belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan (X_1) yaitu untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa, diukur dalam satuan Rupiah (Rp). Belanja pembangunan desa (X_2) merupakan belanja yang terkait pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain lain, diukur dalam satuan Rupiah (Rp). Belanja pemberdayaan masyarakat (X_3) merupakan belanja untuk kegiatan meningkatkan pemahaman kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, diukur dalam satuan Rupiah (Rp). Belanja pembinaan masyarakat (X_4), diukur dalam satuan Rupiah (Rp). Belanja penanggulangan bencana (X_5) berupa kegiatan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, diukur dalam satuan Rupiah (Rp). Tingkat Kemiskinan (Y) merupakan jumlah KPM yang menerima PKH dan BPNT, diukur dalam satuan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Lhokseumawe terletak di tengah Kota Banda Aceh-Medan, mencakup 4 (empat) kecamatan: Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat dan Muara Satu, memiliki 68 (enam puluh delapan) desa dengan total luas wilayah 181,06 km². Berdasarkan tabel dibawah ini, Kecamatan Banda Sakti dan Blang Mangat mengalami penurunan jumlah KPM. Sedangkan di Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah KPM (PKH dan BPNT).

Tabel 1. Data Penerima PKH dan BNPT di Kota Lhokseumawe 2021-2023

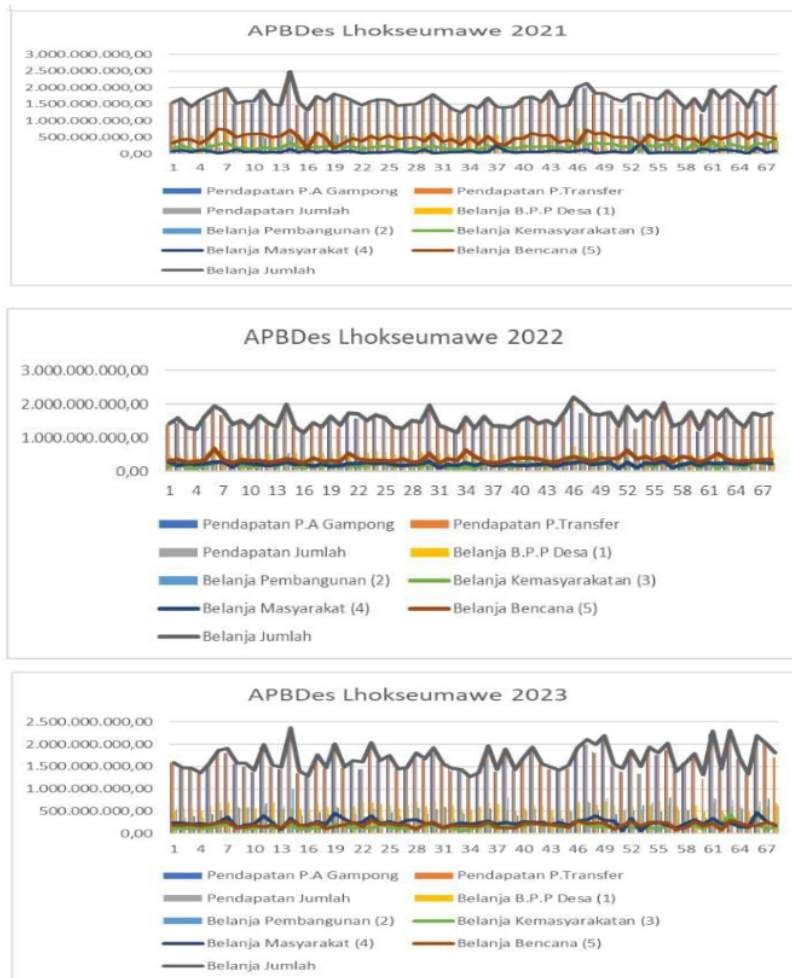
No	Kecamatan	Penerima Bantuan PKH dan BPNT		
		2021	2022	2023
1	Banda Sakti	4.531	3.760	3.618
2	Muara Dua	2.051	3.027	2.795
3	Muara Satu	1.966	2.498	2.265
4	Blang Mangat	3.077	2.510	2.316
Total		11.625	11.795	10.994

APBDes Kota Lhokseumawe adalah dokumen keuangan yang mencantumkan semua pendapatan dan pengeluaran untuk tahun anggaran 2021-2023.

Tabel 2. APBDes Kota Lhokseumawe 2021-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2021	110.303.407.911,47	112.797.506.609,37
2022	102.079.149.641,53	105.948.420.472,05
2023	111.076.198.810,91	114.475.289.571,74

Melalui tabel diatas, tampak bahwa kondisi APBDesa Kota Lhokseumawe menunjukkan defisit. Sumber APBDesa Kota Lhokseumawe, tahun 2021-2023, dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1. Grafik APBDes Kota Lhokseumawe 2021-2023

1

Koefisien korelasi adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menentukan sejauh mana pergerakan keenam variabel yang berbeda, sebagai berikut:

Tabel 3. Koefisien Korelasi

Variabel	Koefisien Korelasi					
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
Penyelenggaraan Pemerintahan	1,000	0,007	-0,019	-0,082	0,153	-0,008
Pembangunan Desa	0,007	1,000	0,021	0,037	-0,166	-0,014
Pembinaan Kemasyarakatan	-0,019	0,021	1,000	-0,055	-0,029	0,030
Pemberdayaan Masyarakat Desa	-0,082	0,037	-0,055	1,000	-0,275	0,151
Bencana	0,153	-0,166	-0,029	-0,275	1,000	0,254
Tingkat Kemiskinan	-0,008	-0,014	0,030	0,151	0,254	1,000

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Tabel diatas menunjukkan korelasi antar setiap variable. Korelasi positif terjadi antara variabel penyelenggaraan pemerintahan (X_1), pembangunan desa (X_2), dan pengeluaran bencana (X_5) terhadap variabel pembinaan kemasyarakatan (X_3), pemberdayaan masyarakat desa (X_4) dan tingkat kemiskinan (Y). Estimasi model regresi yang digunakan adalah *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Berdasarkan tabulasi data seperti Tabel 4 dibawah ini, maka model *common effect* adalah: $Y_{it} = 0,008 - 0,049 X_{1it} + 0,040 X_{2it} + 0,056 X_{3it} + 0,244 X_{4it} + 0,336 X_{5it} + e$

Tabel 4. Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,049	0,012	-0,725	0,469
X2	0,040	0,021	0,586	0,558
X3	0,056	0,026	0,835	0,405
X4	0,244	0,074	3,508	0,001
X5	0,336	0,114	4,738	0,000
C	0,008	0,166	0,121	0,904

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5, maka model *fixed effect model* adalah: $Y_{it} = 0,193 + 0,000 X_{1it} - 0,043 X_{2it} + 0,037 X_{3it} + 0,239 X_{4it} + 0,307 X_{5it} + e$

Tabel 5. Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0,000	0,012	-0,002	0,998
X2	-0,043	0,025	-0,551	0,582
X3	0,037	0,027	0,550	0,583
X4	0,239	0,080	3,175	0,002
X5	0,307	0,131	3,786	0,000
C	0,193	0,206	0,857	0,392

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 6 dibawah, maka model *random effect*: $Y_{it} = 0,181 - 0,013 X_{1it} - 0,029 X_{2it} + 0,040 X_{3it} + 0,243 X_{4it} + 0,314 X_{5it} + e$

Tabel 6. Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,013	0,013	-0,185	0,854
X2	-0,029	0,025	-0,369	0,712
X3	0,040	0,026	0,601	0,548
X4	0,243	0,080	3,230	0,001
X5	0,314	0,131	3,876	0,000
C	0,181	0,197	0,808	0,420

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Pemilihan model regresi panel digunakan untuk menganalisis determinasi belanja APBDes Kota Lhokseumawe terhadap tingkat kemiskinan. Hasil estimasi melalui 3 (tiga) pendekatan yakni: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, menunjukkan bahwa Uji Chow Test *p-value cross section F* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, maka model estimasi yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 7. Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	Df	Prob
Cross-section F	25,510	(203)	0,000

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Uji *Hausman test* menunjukkan hasil nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

Tabel 8. Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chid-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	40596.000	1	0.000

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa nilai *p-value Breusch Pagan* sebesar 0,992. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *p-value Breusch Pagan* $> 0,05$ sehingga model yang terbaik yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*.

Tabel 9. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Breusch-Pagan	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
	0,992	0,010	0,030

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji nilai *residual* yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai probabilitas *Jarque-Bera (JB)* $> 0,05$ maka *residual* berdistribusi normal atau dengan kata lain H_0 ditolak. Uji *Multikolinearitas* bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi

yang tinggi atau sempurna antar variabel *independen*. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian pada tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Koefisien Korelasi	
	Tolerance	VIF
X1	0,988	1,013
X2	0,978	1,022
X3	0,992	1,008
X4	0,989	1,011
X5	0,979	1,021

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Pada tabel diatas, nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil VIF <10,00 atau nilai *Tolerance* >0,10. Oleh sebab itu, maka data pada penelitian ini dapat diartikan tidak terjadi masalah *multikolinearitas* antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas dilakukan guna melihat varian *residuan*. Nilai signifikan >0,05 (tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas) dan jika nilai signifikan <0,05 (terjadi gejala Heteroskedastisitas). Pengujian ini menggunakan uji *Glejser* yaitu meregresikan variabel independen dengan nilai absolut. Pada tabel 11 dibawah, menunjukkan bahwa hasil nilai *probability* dari variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 > 0,05, maka model yang digunakan terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji *glejser* pada Tabel 11.

Tabel 11. Nilai Uji Glejser

Variabel	Probability
X1	0,913
X2	0,815
X3	0,664
X4	0,512
X5	0,204

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah 2024)

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian hipotesis parsial, hipotesis berganda dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil estimasi regresi *Common Effect Model* maka H_0 ditolak yang berarti variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.787E+18	9	1.985E+17	3.584	.000 ^b
	Residual	1.075E+19	194	5.539E+16		
	Total	1.253E+19	203			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Bencana, dum22, Kemasyarakatan, Dum_P_Transfer, dum21, Pembangunan, Bidang_Desa, dum23, Masyarakat

¹ Pada penelitian ini nilai R^2 yang diperoleh dalam estimasi regresi *Common Effect Model* sebesar 0,103 atau 10%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 dapat menerangkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan hanya sebesar 10%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja pada 5 (lima) bidang yang didanai oleh APBDesa tidak mendeterminasi (mempengaruhi) tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sedangkan secara simultan, belanja pada 5 (lima) bidang dalam APBDesa secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan estimasi model analisis data yang digunakan maka dapat disimpulkan: Belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Belanja pada bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang bencana berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

¹ SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih meningkatkan proses pendampingan kepada desa khususnya dalam perencanaan belanja yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan karena masih terdapat belanja desa yang tidak bersentuhan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, khusus di bidang pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan lebih terbuka untuk seluruh masyarakat agar lebih merata dan program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Arfiansyah, M. A. (2020). **Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah**. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(1), 91-106.
- Arifin, A. T. (2021). **Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Tegal** (Doctoral Dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal)

- Dewi, A. S. K. (2014). **Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.** *Journal Of Rural And Development*, 5(1).
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). **Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan.** *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 5(2).
- Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia.** *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 117-130.
- Handayani, D. M. (2019). **Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri** (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
- Hidayat, A., Mehilda, S., & Hendarsyah, D. (2022). **Pengaruh Belanja Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.** *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 126-136.
- Imawan, A., Megasyara, I., & Vensca, S. N. (2020). **Analisis Pendapatan Transfer Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).** *Journal Of Economics, Management, And Business Research*, 1(2).
- Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 146 Tahun 2023 Tentang **Pengalokasian Dana Desa**
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang **Program Keluarga Harapan**
- Setiawati, L. C. (2020). **Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.** *Juhanperak*, 1(2), 619-633.
- Sulistiyoningtyas, L., Zaman, B., & Tohari, A. (2017). **Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron.** *Simki-Economic*, 1(03), 2-14.
- Syahputra, R. (2022). **Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2018.** *Jurnal Samudra Ekonomika*, 6(1), 88-100.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2011). **Pembangunan Ekonomi Jilid 1.**
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang **Desa**
- Wensen, J., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2023). **Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bitung.** *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(3), 265-283.

DETERMINASI BELANJA APBDESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	9%
2	Submitted to University of Glasgow Student Paper	2%
3	eprints.ukmc.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DETERMINASI BELANJA APBDESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
